



**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK  
GENDER  
(STUDI ATAS WAKIL WALIKOTA PALEMBANG  
FITRIANTI AGUSTINDA)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Sosial  
Program Studi Ilmu Politik**

**OLEH:**

**Dita Pratiwi Harianti**

**NIM : 1730702059**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
1442 H/2021**

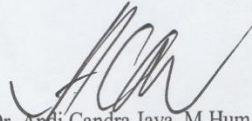
## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

### UJIAN MUNAQSAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari Dita Pratiwi Harianti, Nim. 1730702059 yang berjudul Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender. (Studi Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda). sudah dapat diajukan dalam sidang Munasqah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

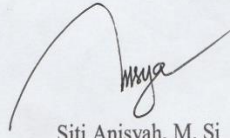
Palembang, 07 Juni 2021

Pembimbing 1



Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum  
NIP. 197201192007011011

Pembimbing 2



Siti Anisyah, M. Si  
NIDN.2012129301

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama** : Dita Pratiwi Harianti  
**Nim** : 1730702059  
**Jurusan** : Ilmu Politik  
**Judul** : Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender. (Studi Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda)

Telah dimunaqosahkan dalam sidang *Offline* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

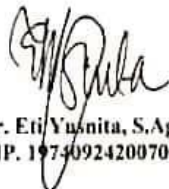
**Hari / Tanggal** : Selasa / 08 Juni 2021  
**Tempat** : Ruang LAB FISIP UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 10 Juni 2021  
  
Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A  
NIP. 196206201988031001

**TIM PENGUJI**

**KETUA**



Dr. Eti Yunita, S.Ag M.Hi  
NIP. 197409242007012016

**SEKRETARIS**



Ryllian Chandra Eka Viana, MA  
NIP. 198604052019031011

**PENGUJI 1**



Dr. Kun Budianto, M.Si  
NIP.197612072007011010

**PENGUJI 2**



Reni Apriani, M.Si  
NIDN. 2021049401

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dita Pratiwi Harianti  
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 05 Maret 1999  
NIM : 1730702059  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul skripsi : Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender (Studi Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda)

Menyatakan dengan soesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 06 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan  
  
Dita Pratiwi  
NIM.1730702059



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

MOTTO: “Jangan jadikan kesuksesan sebagai tujuan, lakukan apa yang kamu cintai dan percaya bahwa sukses akan datang dengan sendirinya”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua Yang Sangat Saya Sayangi Dan Cintai, Mama Saya Annisa As Dan Papa Saya Dadang Harianto Yang Selalu Mensupport Saya, Terimakasih Atas Doa Tulus Dari Mama Dan Papa Dan Juga Terimakasih Karena Telah Mendukung Saya Sampai Sejauh Ini Baik Secara Finansial Maupun Lainnya. Serta Saudara Saya Aditya Harianto Dan Rizki Fitriani Yang Selalu Memberikan Dukungan Dan Membantu Saya Dalam Kesulitan Apapun. Saya Sangat Menyayangi dan Mencintai Kalian.
2. Sahabat Seperjuangan Yang Selalu Menemani Dan Mendukung Saya : Ahmad Gandi Saputra S.Sos, M. Noprianzah, Luthfi Akhiri Ramadhan, M. Orlandio Sumaher, Erika Agustia, Yesi Apriliani, Rani Aprilia, Resty Latipah, Edouar Frimananda, Agnes Tri Utami Dan Febrianto.
3. Adik- Adik Saya Yang Selalu Membantu Saya :Reza Haikal Fikri, Era Fitriani, Nani Purwanti, Erika Novarini, Cindy Amelia, Sindia Nurhaliza.
4. Teman Teman Saya Suicide Squad, Teman Kelas Saya Ilmu Politik B Dan Ilmu Politik Angkatan 2017.
5. Rekan-Rekan Saya Di DEMA FISIP Dan HMPS ILMU POLITIK UIN RADEN FATAH Seluruh Angkatan.
6. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Assalammu'alaikum wr.wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamiin*, Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, tak lupa juga kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan sahabatnya, berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi, sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden fatah Palembang, dengan judul skripsi ini ialah "*Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Politik Gender pada Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda*")". Pelaksanaan dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan, namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

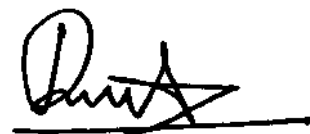
1. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang;
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
6. Dr.Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ryllian Chandra Eka Viana, M.A sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
8. Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I skripsi saya;
9. Siti Anisyah, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II skripsi saya;
10. Vita Justisia, MH, M.Kn sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya
11. Erik Darmawan, S.IP., MH.I sebagai mentor yang selalu membimbing saya sebelum memulai skripsi ;
12. Seluruh Dosen Ilmu Politik dan Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
13. Kelas Ilmu Politik B FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
14. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih melakukan banyak kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan dalam skripsi ini. Penulis juga mengharap adanya kritik serta saran dari pembaca apabila menemukan kesalahan dalam Skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang. *AaminYaRabbal'alamiin.*

*Wassalammu'alaikum wr wb*

Palembang, 06 Juni 2021



Dita Pratiwi Harianti



## **ABSTRAK**

Keterwakilan perempuan dalam perpolitikan dapat dilihat di Provinsi Sumatera Selatan karena menjadi salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia, Sumatera Selatan sudah memberikan tempat bagi kaum perempuan untuk dapat terlibat dalam dunia politik. Keterwakilan kaum perempuan di ruang eksekutif dapat dilihat seperti wakil walikota Palembang Fitrianti Agustinda. Fitrianti Agustinda menjadi wakil walikota perempuan pertama di kota Palembang hal ini dilihat dari sejarah pemerintahan kota Palembang belum ada tradisi kaum perempuan menjadi pemimpin politik selain itu terdapat faktor tradisi zaman dahulu yang membuat kaum perempuan tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender pada Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer ialah : Tokoh Masyarakat Kota Palembang. Sumber data Sekunder berupa buku, jurnal dan internet. Teori yang digunakan adalah teori gender yang terdiri dari nature, nurture dan equilibrium. Hasil penelitian ini ialah dalam masyarakat Palembang yang bermayoritaskan agama Islam perempuan belum pernah menjadi pemimpin dan dalam Islam kedudukan perempuan menjadi seorang pemimpin sebenarnya tidak masalah namun menurut pandangan ulama perempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin ketika masih ada laki-laki yang dapat menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi secara umum sudah banyak perempuan menjadi seorang pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif seperti halnya wakil walikota Palembang. Awalnya kehadiran wakil walikota perempuan masih dianggap langkah oleh masyarakat karena pemimpin itu biasanya laki-laki namun seiring berjalan waktu pemikiran masyarakat mulai terbuka dan mulai menerima kedudukan perempuan menjadi seorang pemimpin serta memberikan kesempatan agar perempuan dapat bekiprah di dunia politik sama dengan kaum laki-laki.”

**Kunci: Gender, Kepemimpinan Politik.**

## **ABSTRACT**

The representation of women in politics can be seen in south Sumatra province because it is one of the largest provinces in Indonesia, South Sumatra has provided a place for women to be involved in politics. The representation of women in the executive room can be seen as Palembang deputy mayor Fitrianti Agustinda. Fitrianti Agustinda became the first female deputy mayor in Palembang city, this is seen from the history of Palembang city government there is no tradition of women becoming political leaders other than that there is a factor of ancient tradition that makes women can not be a leader. The purpose of this study is to find out the Position of Women In Gender Political Perspective in Palembang Deputy Mayor Fitrianti Agustinda. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are by interview and documentation. The primary data source is: Palembang City Community Leaders. Secondary data sources in the form of books, journals and the internet. The theory used is gender theory consisting of nature, nurture and equilibrium. The result of this study is that in Palembang society that prioritizes Islam women have never been leaders and in Islam the position of women to be a leader actually does not matter but in the view of the female cleric it should not be a leader when there are still men who can become a leader. However, in general, there have been many women becoming leaders in both the legislature and the executive as well as the deputy mayor of Palembang. Initially the presence of female deputy mayors was still considered a step by the community because the leader was usually male but over time the community thought began to open and began to accept the position of women to be a leader and provide opportunities for women to be able to be in politics with men."

Key: Gender, Political Leadership.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataa</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Motto Dan Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iv</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. <u>Kegunaan Penelitian</u> .....	<u>10</u>
1. Kegunaan Teoritis .....	10
2. Kegunaan Praktisi .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	17
1. Pendekatan Penelitian .....	17
2. Data dan Sumber Data .....	17
3. Teknik Pengumpulan Data .....	18
4. Lokasi Penelitian .....	19
5. Teknik Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN</b> .....	<b>24</b>
A. Gender .....	24
1. Perspektif Gender .....	26
2. Perempuan Dalam Relasi Gender .....	27
B. Kepemimpinan dan Kedudukan.....	28
1. Kekuasaan dan Kepemimpinan .....	29
2. Kepemimpinan Perempuan .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Kota Palembang .....	32
1. Sejarah Kota Palembang .....	32
2. Letak Geografis Kota Palembang .....	33
3. Wilayah Administrasi .....	34

4. Kependudukan.....	36
B. Biodata Fitrianti Agustinda.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda .....	41
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Peta Kota Palembang .....	33
Gambar 4.1 Saat Fitrianti Berkunjung ke Umkm Pembuatan masker di kecamatan Sukarame.....	49
Gambar 4.2 Saat Fitrianti Berkunjung kerumah Warga yang terkena musibah...	49
Gambar 4.3 Saat Fitrianti menindak lanjuti Laporan Masyarakat. ....	51

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kecamatan Kota Palembang .....	34
Tabel 3.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Palembang .....	35
Tabel 3.3 Kependudukan Menurut Kecamatan Kota Palembang .....	36
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Palembang .....	37
Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Penduduk berdasarkan Kecamatan Kota Palembang .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gender sering dianggap sama dengan jenis kelamin namun sebagian orang mengatakan bahwa gender itu ialah konstruksi sosial yang ada pada individu berdasarkan jenis kelaminnya. Keberadaan gender dalam masyarakat secara tidak langsung menyebabkan ketidakadilan gender yang terjadi karena kaum laki-laki. Ketidakadilan yang dirasakan kaum perempuan memunculkan suatu pergerakan perempuan menuntut hak serta kesetaraan kaum perempuan dan laki-laki atau yang disebut dengan gerakan feminisme

Feminisme diartikan sebagai sebuah usaha kaum perempuan untuk menuntut emansipasi atau persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan. Gerakan feminisme terdiri atas beberapa bagian seperti bagian sosial, budaya, pergerakan politik serta gerakan ekonomi. Kaum feminisme terbentuk berdasarkan dari pemikiran-pemikiran kaum perempuan yang mempunyai kedudukan berbeda dengan laki-laki sehingga mengutamakan kepentingan laki-laki dan merugikan kaum perempuan. Awal mula gerakan feminis ialah dengan adanya pergerakan dari sekelompok aktivis-aktivis perempuan barat yang kemudian menjadi gelombang akademik melalui program "*woman studies*". Feminisme pertama kali dicetuskan aktivis sosialis Perancis Charles Fourier pada tahun 1837. .

Kaum feminis pada tahun 1970 mulai mengembangkan konsep gender sebagai suatu cara untuk mendeskripsikan bahwa kaum perempuan tidak berkaitan dengan laki-laki di setiap budaya dan kaum perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan kaum laki-laki dalam lingkungan masyarakat. Konsep gender mulai dikenalkan kaum feminis pada awal tahun 1977 sejak itu kaum feminis menempatkan konsep gender equality atau kesetaraan gender sebagai pergerakan utama mereka. Kaum feminis mengatakan bahwa gender merupakan konstruksi sosial dan berbeda dengan sex yang mengarah pada anatomi biologis. Konsep gender dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, agama bahkan hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat serta faktor-faktor lainnya. Gender tidak terdiri dari dua jenis yaitu feminim dan maskulin yang sudah diketahui masyarakat. (Rokhmansyah, 2016)

Sejarah perkembangan feminisme dibagi berdasarkan tiga gelombang. Asal mulanya kaum feminis menggunakan isu hak serta kesetaraan kaum perempuan sebagai dasar perjuangan mereka, namun feminisme pada tahun 1960-an menggunakan istilah penindasan dan kebebasan yang kemudian berubah menjadi gerakan pembebasan kaum perempuan. Pada gelombang ketiga yang dimulai tahun 1980-an kaum feminis menginginkan keragaman perempuan atau keragaman secara umum, baik secara umum maupun secara khusus dalam teori feminis dan politik dengan contoh : (1) Kaum perempuan mempunyai warna kulit hitam dipertahankan ketika mempunyai pengalaman kepentingan serta perhatian mereka diwakili oleh kaum feminis gelombang kedua yang di dominasi kaum perempuan berkulit putih kelas menengah (2)



ketertindasan kaum perempuan berkulit putih secara signifikan berbeda berbeda dengan penindasan yang dialami oleh kaum perempuan berkulit hitam. (Heywood, 2016)

Feminisme pada gelombang ketiga lebih berfokus kepada mikro politik dan menentang pandangan yang baik dan tidak untuk kaum pada gelombang kedua. Tokoh utama pemimpin feminis seperti : Gloria Anzaldua, Bell Hooks, Chela Sandoval, Cherrie Moraga, Audre Lorde, Maxine Hong Kingston dan beberapa tokoh feminis lainnya. Feminisme gelombang ketiga menimbulkan perdebatan serta perbedaan bagi kaum feminis. Menurut Carol Giligan adanya perbedaan penting antara seks, percaya bahwa tidak ada perbedaan yang melekat antara seks dan peran gender dalam kondisi dunia sosial.

Keterwakilan perempuan dalam ruang lingkup politik saat ini mengalami peningkatan akan tetapi partisipasi keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga baik di pemerintahan daerah atau tingkat lokal maupun tingkat nasional masih dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat pada pemerintahan tingkat kabupaten karena paling dekat dengan masyarakat serta mempunyai tanggung jawab penuh kepada masyarakat baik dalam bidang sosial maupun politik. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan daerah mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan serta tidak dapat diatasinya prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan dan menambah peminggiran hak serta kedudukan terhadap kaum perempuan dalam bidang sosial baik dalam pemerintah tingkat lokal maupun nasional.

Terciptanya kesetaraan gender di bidang politik disertai dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang membahas tentang pentingnya melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang selalu mengutamakan keadilan bahkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di setiap kegiatan aktivitas sosial politik. Selain itu ada Undang-Undang yang mendukung serta mengatakan bahwa keterwakilan serta kedudukan kaum perempuan dalam setiap kegiatan aktivitas politik itu minimal 30% ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. (Rasyidin, 2016)

Pembagian kedudukan ini merupakan salah satu upaya agar isu keterwakilan dan kedudukan perempuan dapat ditindak lanjuti. Menurut pasal 53 UU tersebut mewajibkan partai politik untuk memimpin minimal 30% kaum perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, Secara tidak langsung Undang-Undang ini tidak memberikan sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan contohnya pada tahun 2009 enam dari tiga puluh delapan partai politik yang mengikuti pemilihan umum gagal menominasikan 30% calon legislatif perempuan yang telah diusulkannya.

Kaum perempuan saat ini mempunyai kesempatan untuk untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti partai politik maupun pemilihan di parlemen. Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia salah satu presiden Republik Indonesia seorang perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri. Meskipun terdapat keraguan dari berbagai pihak Megawati membuktikan pelaksanaan affirmative action. Ini merupakan peningkatan dan hampir semua partisipasi perempuan dalam kegiatan politik ialah suatu pelaksanaan strategi

yang tidak jelas.

Hambatan partisipasi kaum perempuan dalam kegiatan politik sudah ada dan lebih besar daripada kaum laki-laki yang menuntut standar dan kualitas yang sama atas ketiadilan pemimpin perempuan di ruang lingkup budaya patriarki yang masih ada di Indonesia. Jika partisipasi perempuan mencapai angka 30% secara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan kaum perempuan. Adanya pendidikan politik, peningkatan rasa kepercayaan diri serta kesadaran perempuan yang mempunyai kedudukan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki menjadi salah satu yang masih dibicarakan dengan masyarakat agar terciptanya harapan dan keinginan yang dicapai.

Keterwakilan kaum perempuan dalam politik setidaknya perlahan mulai mendapatkan peningkatan partisipasi seperti yang diharapkan yaitu kedudukan dan keterwakilan kaum perempuan di berbagai macam lembaga-lembaga pemerintahan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional masih dikatakan rendah. Tingkat kabupaten merupakan tingkat pemerintah yang sangat dekat dengan masyarakat serta mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan daerah seperti pelayanan sosial bagi masyarakatnya. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan tingkat kabupaten mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan serta tidak teratasinya kekhawatiran kaum perempuan yang telah menjadi prioritas pembangunan daerah dan mengakibatkan marginalisasi terhadap kaum perempuan yang mendapatkan pelayanan di tingkat lokal. Kesempatan serta kedudukan bagi kaum perempuan dalam

pelaksanaan peranannya di lembaga eksekutif, yudikatif dan pemilu menunjukkan bahwa keadilan dan kesetaraan gender diatur dalam Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 yang berisi mengenai keterwakilan perempuan di ruang lingkup politik.

Menurut hakikatnya kaum perempuan yang telah meraih 30% kursi dalam berbagai kegiatan politik yang dicalonkan oleh partai politik untuk memperoleh kursi parlemen, namun pada kenyataannya keterwakilan perempuan hanyalah menjadi pelengkap dan penuntas syarat bagi partai untuk memasuki pemilihan umum. Proses. Secara tidak langsung, pemberian kuota bagi perempuan dikatakan agar mencegah kaum laki-laki mendominasi penuh kepengurusan dan jabatan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam politik dapat dilihat dari banyak hal dan hambatan dalam pelaksanaannya. Perempuan harus mendapatkan pendidikan politik dari partai tempatnya bekerja untuk meningkatkan kecerdasannya, agar perempuan dapat maju, sehingga dapat menjaga keseimbangan dengan elit politik yang dominan seperti laki-laki. (Rasyidin, 2016)

Kurang berpartisipasi perempuan dalam ranah politik disebabkan turun-turunnya pemikiran patriarki yang mengatakan bahwa politik merupakan ruang bagi laki-laki dan kaum perempuan masih kurang tertarik di bidang politik karena terdoktrin bawah dunia politik itu tidaklah baik bagi perempuan dan bahkan politik itu kotor. Maka dari itu untuk memperbaiki keadaan tersebut sudah sebaiknya diberikan pengetahuan dengan penjelasan bahwa

perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai bidang khususnya dalam menyuarkan aspirasinya.

Dunia politik menjadi suatu tantangan yang menarik untuk diikuti oleh sebagian masyarakat. Karena pada era reformasi memberikan kesempatan luas bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Terbentuknya partai politik pada dasarnya membuka jalan bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota parlemen bahkan menjadi anggota legislatif. Dalam lembaga eksekutif kebebasan dapat dilakukan melalui calon dari jalur independen. Kebebasan di era demokrasi membuka ruang bagi siapapun untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Keterbatasan kuota dilihat dari perbedaan yang akan menduduki di bagian lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Hadirnya kaum perempuan untuk menduduki kursi legislatif maupun eksekutif masih terkendala oleh budaya patriarki yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Budaya patriarki yang dianut di tengah masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan kaum perempuan tidak mempunyai akses untuk terjun ke ranah politik. Posisi kaum perempuan masih dianggap sebelah mata selain itu perempuan dianggap mempunyai hak yang berbeda dengan kaum laki-laki dalam memasuki dunia politik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih baik bekerja di dalam wilayah domestik saja seperti mencuci, mengurus rumah tangga dan memasak. Hal inilah yang menjadikan kaum perempuan tidak percaya diri dengan kemampuan apa yang dimilikinya dan mengakibatkan partisipasi perempuan dalam politik seolah-olah sudah

dibatasi.

Keterwakilan perempuan dalam perpolitikan dapat dilihat pada Provinsi Sumatera Selatan karena menjadi salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia, Sumatera selatan sudah memberikan tempat bagi kaum perempuan untuk dapat terlibat dalam dunia politik. Tidak dalam ranah legislatif saja, kaum perempuan di Sumatera Selatan telah menunjukkan eksistensinya. Dalam ruang legislatif sejak adanya peraturan kuota 30% mengenai keterwakilan perempuan dalam berpolitik membuka peluang untuk kaum perempuan agar dapat berpartisipasi dalam politik dan sama dengan kaum laki-laki, keikutsertaan ini mempunyai dampak serta antusias yang tinggi dari kaum perempuan sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Contoh keterwakilan kaum perempuan di ruang eksekutif dapat dilihat seperti wakil walikota Palembang Fitrianti Agustinda.

Fitrianti Agustinda merupakan wakil walikota perempuan pertama di kota Palembang hal ini dilihat dari sejarah pemerintahan kota Palembang belum ada tradisi kaum perempuan menjadi pemimpin politik selain itu terdapat faktor tradisi zaman dahulu yang membuat kaum perempuan tidak dapat menjadi seorang pemimpin.

Fitrianti Agustinda menjabat sebagai Wakil Walikota Palembang bersama dengan Harnojoyo sebagai walikota pada periode jabatan yang pertama tahun 2016-2018 dan periode yang kedua pada tahun 2018-2022. Sebelum Fitrianti Agustinda menjabat sebagai wakil walikota ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

Palembang Fraksi PDI. Nama Fitrianti Agustinda mulai dikenal luas masyarakat Kota Palembang karena visi misi serta gerakannya yang berusaha membawa Kota Palembang lebih maju dan baik lagi kedepannya sehingga dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain yang ada di Indonesia.

Fitrianti Agustinda menunjukkan bahwasanya dirinya sebagai perempuan tidak ingin dipandang sebelah mata. Fitrianti membantah pandangan orang-orang yang mengatakan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut, tidak bisa bekerja seperti laki-laki bahkan tidak bisa memimpin. Menurut Fitrianti perempuan juga bisa bekerja dan memimpin seperti laki-laki. Dengan ciri kepemimpinan yang tegas, berwibawa, serta dekat dengan semua golongan masyarakat tanpa memandang status sosialnya menjadikan Fitrianti Agustinda semakin dikenal masyarakat dan mendapatkan penghargaan sebagai tokoh perempuan inspiratif. (Sumeks.Co, 2019)

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas maka peneliti tertarik menyusun penelitian dengan judul “Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender. (Studi Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda)”

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Diatas, Maka Penulis Merumuskan Permasalahan Sebagai Berikut *“Bagaimana Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Politik Gender pada Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda ?”*

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini “*Untuk Bagaimana Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Politik Gender pada Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda*”

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengetahuan bidang politik dan menjadi kajian dalam literatur ilmu politik terutama mengenai Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender.

#### 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda.

### E. Tinjauan Pustaka

Di dalam suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Pertama, dari Very Wahyudi (2018) “*Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender*” staff pengajar Jurusan Pemikiran Islam UIN Mataram. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peranan perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Berawal dari adanya budaya patriaki yang mendominasi terhadap realitas masyarakat bahkan negara yang mengakibatkan



tidak berubahnya pandangan seseorang mengenai politik yang merupakan wilayah publik dan bisa dimasuki kaum perempuan.(Wahyudi, 2018)

Akibatnya jumlah kaum perempuan yang mempunyai potensi di bidang ini masih sedikit tetapi mampu bersaing dengan kaum laki-laki yang didominasi bisa lebih maju daripada kaum perempuan.Hingga saat ini kaum perempuan yang telah memasuki ranah publik sudah mengalami peningkatan namun tingkat persentasinya masih sangat rendah meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur dan menjamin mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

Kedua, dari Abdul Rahim “*Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender*”: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran perempuan dalam masyarakat diantara aspek reproduksi, kepemimpinan ekonomi, sosial politik bahkan dalam islam yang menempatkan perempuan dalam kegiatan atau organisasi masyarakat. Dibuktikan dengan jumlah perempuan yang aktif dalam organisasi dan mereka tidak mempunyai keberanian seperti laki-laki khususnya dalam memimpin.

Alasan ini membuat kaum perempuan diterima dan diimplementasikan dalam dunia politik yang ada. Faktor pengaruh keterlibatan kaum perempuan dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. semua tugas yang dipercayakan kepada perempuan bisa dilaksanakan karena tugas mereka ini merupakan hubungan antara tugas dan pendidikan. (Rahim, 2016)

Ketiga, dari Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana dan Mila Sartika “*Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender*” Universitas Dian Nuswantoro dan UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada zaman pra Islam dan budaya masyarakat Arab Jahiliyyah kaum perempuan mendapat perlakuan yang tidak setara dengan kaum laki-laki sehingga tidak menunjukkan adanya kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan perempuan .(Hendri Hermawan Adinugraha, 2018)

Setelah hadirnya agama Islam, ajaran islam langsung mengangkat harkat serta martabat kaum perempuan dalam islam di mata allah yang menjadi pembedaan antara kaum laki-laki dan perempuan hanyalah taqwanya. Pada periode klasik kaum perempuan mempunyai peranan dalam berbagai aspek kehidupan seperti bidang hadist, perang, berniaga serta aspek lainnya. Pada periode pertengahan kaum perempuan mempunyai peran penting dalam kehidupan politik bahkan bernegara.

Keempat, dari Salmah Intan “*Kedudukan Perempuan Dalam Domestic Dan Publik Perspektif Gender*” Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makasar. Penelitian ini menjelaskan menurut *normativisme* Islam tidak diatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Namun Islam mengatur tempat-tempat tertentu untuk diatur oleh laki-laki dan perempuan menurut akal pikiran berdasarkan tuntutan yang berkembang. (Intan, 2014)

Hal ini berdasarkan atas paham yang membedakan antara kaum laki-laki dan perempuan menurut kodrat perempuan secara benar. Hal yang termasuk dalam kodrat perempuan mengakibatkan perempuan tidak dapat mengambil tugas ekonomi, kaum perempuan dianggap hanya bisa mengandung dan melahirkan saja. Ketika tugas ini tidak dialami maka kaum perempuan dan laki-laki dan memainkan perannya di ranah publik maupun di rumah tangga karena tugas rumah tangga tidak mengenal batas jenis kelamin.

Dari keseluruhan penelitian yang telah ditinjau berkaitan dengan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda penelitian diatas secara spesifik tidak meneliti mengenai kedudukan perempuan dalam perspektif politik gender khususnya atas wakil walikota fitrianti agustinda. Adapun yang membedakannya penelitian terdahulu lebih fokus terhadap peran politik perempuan, kewenangan dan kedudukannya. Dengan adanya penelitian mengenai Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## **F. Kerangka Teori**

### *1. Teori Gender*

Gender digunakan dalam membedakan peran antara kaum laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan kenyataan biologis, tetapi menurut fungsi dan peran yang dikonstruksikan oleh masyarakat atau disebut dengan istilah jenis kelamin. Kajian gender melahirkan tiga teori utama, yaitu: *teori*

*nature, teori nurture dan teori equilibrium.*

a. Teori *Nature*

Teori *Nature* menjelaskan bahwa perbedaan peran antara kaum laki-laki dan perempuan bersifat kodrati dan alami (*nature*). Ini diakibatkan anatomi biologi yang melekat sehingga jenis kelamin antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang berbeda menjadi penentu utama perbedaan peran sosial. Laki-laki mempunyai peran utama dalam lingkungan masyarakat karena laki-laki dianggap lebih kuat mempunyai potensial dan dianggap lebih produktif dalam melakukan sesuatu. Sedangkan, kaum perempuan mempunyai peran yang dikuasai karena kaum perempuan mempunyai batasan dalam melaksanakan gerakannya. Perbedaan ini menyebabkan pemisahan peran, serta tanggung jawab antara kaum laki-laki dan perempuan. (Utaminingsih, 2017)

Teori yang digunakan dalam melihat permasalahan *gender* diangkat dari teori-teori yang dikemukakan oleh ahli dalam permasalahan *gender* terutama ahli dalam bidang sosial kemasyarakatan maupun jiwa psikologis Berdasarkan teori *nature*, perbedaan *gender* dimaknai sebagai kodrat alam atau sering disebut “sabda alam” yang tidak perlu dipermasalahkan lagi keberadaannya, yang menegaskan bahwa secara alamiah laki-laki dan perempuan itu berbeda secara biologis ciri-ciri spesifik yang melekat pada masing-masing jenis kelamin. Karena merupakan ciptaan Tuhan dan berlaku secara universal sesuai dengan fungsi dari jenis kelamin tersebut, sehingga ini tidak bisa ditukarkan.

Teori *nature* mengarah dengan para ilmuwan klasik dan religious, terkadang teori ini dikaitkan dengan Rousseau, Kant dan Hegel. Namun secara ilmiah tokoh utama teori ini adalah Charles Darwin dan didukung oleh Teori Hereditas Gregor Mendel. (Khuza'i, 2013)

b. Teori *Nurture*

Teori *nurture* menjelaskan bahwa perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan atas pembentukan atau konstruksi dari masyarakat. Dalam teori *nurture* anggapan bahwasanya peran sosial yang dianggap sudah lama dan dikaitkan sebagai aliran agama, ini bukan keinginan tuhan tetapi bukan sebagai hasil penentuan biologis melainkan sebagai bagian sosial, maka nilai-nilai *gender* yang terjadi di masyarakat sesungguhnya tidak lain dari konstruksi budaya masyarakatnya. (Utaminingsih, 2017)

Teori *nurture* memandang perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan ialah sebuah hasil rekayasa konstruksi sosial budaya dan bukan kodrat, sehingga mendapatkan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Secara sosiologis memunculkan gerakan *feminisme* yaitu berupa aliran atau gerakan kaum perempuan yang mempunyai fokus pada aktivitas pemberdayaan kaum perempuan (mengkoordinasi potensi-potensi yang ada kaum perempuan secara optimal) agar kedudukannya bisa setara dengan kaum laki-laki di segala bidang yang dikenal dengan emansipasi wanita.

Perkembangan konsep teori nurture tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh pengusungnya. Diantaranya ialah seperti Margaret Mead, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Sigmund Freud, Hilary M. Lips, Ann Oakley, Nancy Chodorow, Judith Butler dan lain-lain. (Khuza'i, 2013)

c. Teori *Equilibrium*

Selain Teori kedua teori tersebut muncul teori yang bersifat kompromistis atau menjembatani pemahaman penganutnya yang dikenal dengan teori keseimbangan (*equilibrium*). Teori equilibrium menekankan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam sebuah hubungan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa bahkan negara.

Sehingga mewujudkan gagasan tersebut, berdasarkan konteks perubahan sosial dan pembangunan, maka diharapkan bahwa setiap kebijakan dan pembangunan agar diperhitungkan kepentingannya dalam peran perempuan dan laki-laki secara seimbang atau pembangunan berspektif gender. (Utaminingsih, 2017)

Menurut analisa peneliti, berdasarkan penjabaran mengenai teori gender, penelitian yang berjudul Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda akan diteliti menggunakan teori *nurture*, karena teori ini

paling tepat untuk mengetahui perbedaan peran antara kaum laki-laki dan perempuan merupakan hasil rekayasa atau konstruksi sosial budaya yang bisa dipertukarkan sehingga memunculkan gerakan *feminisme* untuk pemberdayaan perempuan dan pengoptimalan potensi dalam berbagai bidang kehidupan khususnya bidang sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alami dengan maksud menafsirkan fenomena yang sedang terjadi dan melibatkan berbagai metode yang ada. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif sebuah penelitian yang di buat dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta sertamampu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena secara objektif.

### **2. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah dimana seorang Penulis memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data antara lain :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pengamatan yang dilakukan dengan cara mewawancarai tokoh masyarakat Kota Palembang secara langsung, serta mengumpulkan arsip dokumen mengenai kepemimpinan perempuan saat ini khususnya di Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan serta sebagai data pendukung dari sumber data utama, agar penelitian memiliki hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Sumber didapatkan dari berbagai buku, jurnal, internet, berita lain yang berhubungan dengan penelitian Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik wawancara sebagai cara utama untuk mengumpulkan data atau sebuah informasi. Wawancara yang dilakukan peneliti bersifat terstruktur yang dilakukan harus menetapkan masalah dari pertanyaan yang akan diberikan ketika proses wawancara sedang berlangsung.



Sebelum memulai wawancara mendalam agar mendapatkan informasi yang diperlukan, maka peneliti menggunakan pembicaraan informal terlebih dahulu agar terjalin komunikasi yang baik dan menimbulkan timbal balik antara peneliti dengan yang akan di wawancarai selain itu, peneliti juga berpegang pada pedoman yang disusun sebelumnya. Pada penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan wawancara yang bersifat terpimpin sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan saat proses wawancara sedang berlangsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari atau mengumpulkan data mengenai masalah yang akan diteliti, yang bersumber dari buku, jurnal, internet, berita dan sumber yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini memilih kota Palembang. Alasannya karena untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda. Karena masyarakat kota Palembang sangat peka terhadap dunia politik dan juga dalam kepemimpinan kekuasaan politik melalui gender hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui reaksi dan

perspektif masyarakat kota Palembang terhadap wakil walikota perempuan.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisa data disebut sebagai suatu cara dalam mengolah data dan menafsirkan data, analisa data merupakan sebuah kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena ini memiliki nilai sosial akademis bahkan ilmiah. Kegiatan yang tersusun dalam analisis data seperti mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data berdasarkan variabel dan jenis responden, serta menyajikan data berdasarkan variabel yang diteliti. (Mamik, 2015)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana mendeskripsikan serta menganalisis data yang didapat dan selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. dalam analisis kualitatif ada beberapa tahapan yaitu :

### a. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, perubahan data kasar yang muncul dari catatan-catatan penulis yang didapatkan di lapangan. Dengan tahap ini peneliti memilih hasil wawancara dan dokumentasi yang belum terstruktur sehingga penulis mendapatkan data yang terkait mengenai Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda. (Albi Anggito, 2018)

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah memaparkan data-data atau sekumpulan informasi yang telah disusun dengan tujuan memberikan gambaran keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian dan bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dalam melakukan pengambilan tindakan penyajian data dalam penelitian bisa berbentuk teks naratif dan kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. (Yusuf, 2014)

#### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari suatu analisis adalah penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dari awal penelitian dan peneliti telah mencatat serta memberi makna mengenai sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan gambaran permasalahan yang akan peneliti lakukan sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam menyimpulkan tentang Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda. (Yusuf, 2014)

### **H. Sistematika Penulisan Laporan**

Agar mempermudah penulisan dan pembahasan untuk menyusun penelitian ini maka perlu dikemukakan terlebih dahulu sistematika dan penyusunan secara keseluruhan secara garis besarnya penelitian ini terdiri dari Lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini secara singkat menjelaskan tentang pembahasan yang berhubungan dengan penelitian. Pendahuluan terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika penulisan dan daftar pustaka. Bab ini menjadi dasar dalam pembuatan skripsi yang berjudul Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda.

## **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN**

Dalam bab ini secara khusus menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda. berbeda dengan Bab I pada bab ini peneliti fokus pada kajian pustaka masalah yang diangkat.

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Palembang, pada bab ini peneliti akan menganalisa tentang Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang hasil dan data yang telah peneliti dapat dari proses pengumpulan data dan proses analisis data. Penulisan hasil dan pembahasan ini ditentukan dari rumusan masalah dan teorinya. Maka pada bab ini peneliti menyajikan hasil dan pembahasan tentang Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir penulis menyimpulkan seluruh data yang telah didapatkan dari penelitian dan menyampaikan saran dari penelitian mengenai Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Politik Gender Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN**

#### **A. Politik Gender**

Menurut kajian feminisme gender mempunyai ciri-ciri atau sifat yang dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu, baik berupa kebiasaan, budaya, maupun perilaku psikologis dan bukan perbedaan secara biologis. Secara sederhana kesetaraan gender membedakan arti seks sebagai jenis kelamin biologis sejak lahir, yaitu laki-laki atau perempuan berdasarkan alat kelamin yang dimiliki, sedangkan gender merupakan “jenis kelamin” sosial berupa pelengkap sifat maskulin atau feminim yang merupakan konstruksi sosial budaya.

Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang terbentuk oleh faktor sosial, politik, budaya dan masyarakat sehingga terjadi tanggapan mengenai peran sosial dan budaya antara kaum laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial yang terjadi antara kaum laki-laki maupun perempuan seperti perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, keibuan dan emosional. Sementara laki-laki dianggap sebagai orang yang kebal, kuat, rasional, jantan dan perkasa. Perubahan sifat-sifat ini dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke-waktu. Artinya ada kaum perempuan yang kuat dan rasional dan ada laki-laki yang memiliki sifat lemah lembut dan irasional. (Ni Nyoman Sukerti, 2016)

Ann Oakley dalam gender dan politik mengartikan gender sebagai sebuah konstruksi sosial yang digunakan manusia dalam membangun kebudayaan manusia itu sendiri. Gender merupakan perbedaan pada manusia yang bukan melalui biologis dan kodrat illahi. Gender itu merupakan perbedaan perilaku antara kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Selain itu, gender bukan ketentuan tuhan melainkan dibangun oleh masyarakat dengan proses sosial dan budaya dalam waktu yang lama.

Oakley Stoller dalam gender dan wanita karier mendefinisikan gender sebagai perbedaan yang bersifat biologis dan bukan kodrat tuhan. Stoller mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial yang digunakan oleh manusia dan dibangun oleh kebudayaan manusia. Sarah Byrne dan Matthias Schnyder dalam gender dan wanita karier mendefinisikan gender sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya gender merupakan definisi dari segi sosial antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu di dalam perspektif gender mempertimbangkan peran antara laki-laki dan perempuan yang membedakan kekuasaan didalam masyarakat. Riant Nugroho mengartikan gender sebagai kontruksi sosial budaya yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh sistem sosial budaya.(Utaminingsih, 2017)

Menurut Hilary M. Lips gender diartikan sebagai sebuah budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan dikenal sebagai orang yang lemah lembut, emosional dan bersifat keibuan. Sedangkan laki-laki dikenal sebagai orang yang kuat, pekerja keras , perkasa dan dapat melindungi

perempuan. Ciri-ciri dan sifat yang terdapat dalam diri laki-laki maupun perempuan merupakan karakter yang dapat dipertukarkan. Contohnya ada laki-laki yang mempunyai sifat lemah lembut dan mempunyai sifat emosional, sebaliknya ada perempuan yang kuat dan dapat bekerja keras, rasional dan menjadi tulang punggung keluarga. Perubahan ciri dan sifat antara laki-laki dan perempuan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakatnya.

#### 1. Perspektif Gender

Gender dibedakan dengan kata seks. Seks diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin antara kaum laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrat mempunyai fungsi yang berbeda. Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural melalui proses panjang. Gender merupakan konstruksi dan struktur sosial mengenai perbedaan jenis kelamin yang mengarah pada hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, atau sifat yang telah ditentukan secara sosial maupun budaya. Contohnya, perempuan dikenal sebagai orang yang lemah, lembut, cantik, setia dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai orang yang kuat, gagah, sering mengedepankan akal, agresif, jantan dan perkasa. (Fakih, 2012)

Riant Nugroho mengatakan bahwa jenis kelamin dibagi berdasarkan fakta biologis yang telah ditentukan menurut faktor genetik serta faktor lain yang ada dalam lingkungan setempat. Sedangkan gender merupakan pembagian berdasarkan pada perbedaan biologis tetapi didalamnya



terdapat karakteristik serta ciri khas antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender memunculkan pemahaman mengenai perbedaan antara jenis kelamin dan peran gender yang menyangkut jenis kelamin tidak dapat diubah, misalnya secara biologis perempuan mempunyai kemampuan mengandung dan melahirkan, sementara laki-laki tidak dapat melahirkan dan menyusui seperti perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengarah pada perbedaan fisik terutama pada fungsi reproduksi atau diartikan sebagai alat yang mempunyai fungsi dalam mencapai kepuasan secara biologis. Sedangkan gender tidak berhubungan dengan perbedaan filosofis seperti yang selama ini banyak dijumpai di kehidupan masyarakat. Gender membagi pekerjaan menjadi maskulin dan feminim. Maskulin diduduki kaum laki-laki sedangkan feminin ditempati oleh perempuan. (Fakih, 2012)

## 2. Perempuan dalam Relasi Gender

Dalam dunia modern seperti saat ini sebagian perempuan menganggap bahwa pekerjaan domestic hanya membosankan karena bersifat rutinitas sehingga kaum perempuan ingin mengembangkan dirinya terutama perempuan yang mempunyai potensi dan mempunyai pendidikan tinggi disertai anak-anaknya sudah bersekolah) hal ini karena mereka ingin mendapatkan nilai tambah dengan cara mencari aktivitas di luar rumah untuk eksistensi diri yang dapat bernilai ekonomis dengan cara bekerja di ranah publik.(Utaminingsih, 2017)

## B. Konsep Kepemimpinan dan Kedudukan

Kepemimpinan secara umum diartikan sebagai suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain. Pemimpin merupakan seseorang yang menggunakan kemampuan, sikap, naluri dan kepribadiannya sehingga menciptakan keadaan seseorang yang dipimpin hingga terpengaruh dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Muhammad Ryaas Rasyid mengartikan bahwa seorang pemimpin dianggap sebagai orang yang dapat membuktikan bahwa dirinya mampu mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain. Kepemimpinan diartikan sebagai konsep yang merangkum segi diantaranya ialah proses interaksi antara seorang pemimpin dan yang dipimpin dalam mengapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Sandang P.Siagian mengartikan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan dari seseorang yang mempunyai jabatan sebagai pemimpin dalam ruang lingkup kerja yang mempunyai tugas berfikir serta bertindak melalui perilaku positif dan memberikan sumbangsih dalam pencapaian organisasi. (Maimunah, 2017)

Kepemimpinan merupakan sebuah proses dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dimanapun terdapat manusia yang hidup bersama mereka memerlukan bentuk kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, karena tidak ada pemimpin tanpa adanya kepemimpinan sedangkan kepemimpinan tidak akan berjalan tanpa

adanya seorang pemimpin. Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut sebagai leader sedangkan kegiatannya disebut leadership.

Maxwell dalam *Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin* mengatakan bahwa pemimpin yang baik harus mempunyai ciri-ciri seperti : pemimpin yang dapat menciptakan lingkungan yang tepat dan bisa memperhatikan anggota maupun bawahannya, pemimpin yang dapat mengetahui kebutuhan bawahannya, pemimpin yang bisa mengatur keuangan, pemimpin yang dapat menghindari dosa, pemimpin yang tidak meminta nasehat dan bantuan kepada orang lain serta pemimpin yang tidak mengembangkan rasa tanggung jawab orang lain. (Reny Yulianti, 2018)

#### 1. Kekuasaan Dan Kepemimpinan

Kekuasaan dan kepemimpinan itu sangat berhubungan karena dengan adanya kekuasaan pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bawahannya. Menurut Hersey Blanchard dan Natemeyer bahwa seorang pemimpin tidak hanya menilai perilaku dirinya sendiri untuk mempengaruhi orang lain tetapi juga mengerti posisi mereka dan bagaimana cara agar menggunakan kekuasaan yang mereka punya untuk mempengaruhi orang lain sehingga kepemimpinan menjadi efektif. Secara sederhana kepemimpinan diartikan sebagai usaha dalam mempengaruhi sementara kekuasaan diartikan sebagai potensi dari seorang pemimpin. Jadi kekuasaan merupakan salah satu kunci utama seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan otoritas dapat diartikan sebagai bentuk khusus dari kekuasaan yang melekat pada jabatan yang ditempati oleh pemimpin. (Yudiatmaja, 2013)

## 2. Kepemimpinan Perempuan

Perkembangan kaum perempuan dari tahun ke tahun mengalami suatu perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini karena semakin banyak kaum perempuan yang memasuki ranah politik maupun organisasi yang melibatkan kaum perempuan di berbagai jenis kegiatan yang ada di masyarakat. Banyak kaum perempuan yang berhasil mendapatkan jabatan sebagai pemimpin dari posisi rendah hingga posisi tertinggi yang ada dalam suatu lembaga atau Negara.

Kepemimpinan perempuan memunculkan pertentangan di kalangan umat Islam khususnya para ulama dan organisasi Islam lainnya yang berkaitan dengan pandangan Islam terhadap keberadaan pemimpin perempuan dalam jabatan-jabatan strategis di sektor publik. Pertentangan ini terjadi karena terdapat pandangan tentang perbedaan struktur biologis antara laki-laki maupun perempuan serta peran yang dikerjakannya dalam masyarakat. Dalam struktur biologis perempuan dianggap mempunyai banyak kelemahan dibandingkan kaum laki-laki. Oleh karena itu laki-laki dianggap lebih tepat untuk menjadi seorang pemimpin dalam lingkungan masyarakat karena lebih kuat, potensial dan lebih produktif.

Ruang gerak perempuan dibatasi oleh organ reproduksi karena secara kodrat perempuan dapat melahirkan bahkan menyusui. Sedangkan laki-laki secara kodrati tidak mempunyai fungsi reproduksi. Perbedaan ini melahirkan pemisahan fungsi serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap lebih tepat untuk berperan di sektor publik,

sedangkan perempuan dianggap lebih tepat berperan dalam kerumah tangga.

Adanya dua perbedaan dalam kehidupan sosial baik antara laki-laki maupun perempuan. lingkungan masyarakat dianggap sebagai tempat pertama bagi laki-laki dan perempuan lebih akrab dengan lingkungan rumah tangga dan hubungan antara keduanya dianggap tidak langsung. Secara umum perempuan dalam adat kurang dikenal bahkan tidak mempunyai wewenang. Hal ini terjadi karena perempuan hanya mempunyai tugas untuk mengasuh anak-anak bahkan berada di lingkungan rumah tangga saja.

Selain itu penyebab perempuan kurang berpartisipasi di ranah politik, seperti : Secara kultural diperkuat oleh agama kaum perempuan diletakan di posisi subordinat terhadap laki-laki, perempuan dianggap sebagai makhluk yang berada di bawah kepemimpinan laki-laki sehingga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi bahkan kehidupan pribadi kaum perempuan tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai hak dalam mengambil keputusan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Palembang**

##### **1. Sejarah Kota Palembang**

Kota Palembang merupakan ibu kota tertua di Indonesia, Kota Palembang dipandang sebagai pusat dari kerajaan Sriwijaya berdasarkan pada prasasti Kedukan Bukit (683 M) yang ditemukan di wilayah Bukit Siguntang sebelah barat Kota Palembang. Menyatakan pembentukan sebuah wanua yang dijadikan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 682 Masehi maka tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir Kota Palembang.

Menurut topografinya, Kota Palembang dikelilingi oleh air bahkan masih terendam oleh air. Air tersebut berasal dari sungai, rawa bahkan air hujan. Sampai saat ini di Kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang masih digenangi oleh air karena kondisi inilah nenek moyang menamakan kota ini sebagai Kota Palembang dalam bahasa melayu Pa atau Pe diartikan sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan, sedangkan lembang atau lembeng diartikan sebagai tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air. Sedangkan menurut bahasa melayu Palembang, lembang atau lembeng merupakan genangan air. Jadi Kota Palembang merupakan suatu tempat yang masih digenangi oleh air. (Palembang P. R., 2019)

## 2. Letak Geografis Kota Palembang

Secara astronomis Kota Palembang terletak antara  $2^{\circ} 52'$  sampai  $3^{\circ} 5'$  Lintang Selatan dan  $104^{\circ} 37'$  sampai  $104^{\circ} 52'$  Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar  $400,61 \text{ km}^2$ . Secara geografis batas kota Palembang ialah batas utara, timur dan batas barat terletak di Kabupaten Banyuasin, Batas Selatan Terletak Di Kabupaten Muara Enim Dan Kabupaten Ogan Ilir. (Palembang B. P., 2020)

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 1988, wilayah Kota Palembang memiliki luas sebesar  $400,61 \text{ km}^2$  atau  $40.061 \text{ Ha}$ . Kecamatan Gandus memiliki memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya ( $68,78 \text{ km}^2 / 17,17\%$ ) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil ( $6,22 \text{ km}^2 / 1,55\%$ ).

**Gambar 3.1 Peta Kota Palembang.**



**Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)**

**Tabel 3.1 Kecamatan Kota Palembang**

KECAMATAN	
1. Ilir Barat II	2. Kemuning
3. Gandus	4. Ilir Timur II
5. Seberang Ulu I	6. Kalidoni
7. Kertapati	8. Ilir Timur III
9. Jakabaring	10. Sako
11. Seberang Ulu II	12. Sematang Borang
13. Plaju	14. Sukarami
15. Ilir Barat I	16. Alang- Alang Lebar
17. Bukit Kecil	18. Ilir Timur I

**Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)**

Menurut SK Nomor 136/4123/BAK tahun 2018 mengenai wilayah administrasi Kota Palembang mengalami pemekaran Kecamatan dengan dibentuknya Kecamatan Jakabaring merupakan pemekaran wilayah dari kecamatan seberang Ulu I dan kecamatan Ilir Timur Tiga merupakan bagian pemekaran wilayah dari Kecamatan Ilir Timur II. Sehingga secara administrasi Kota Palembang saat ini terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan. (Palembang B. P., 2020)

### 3. Wilayah Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa Kota Palembang termasuk dalam daerah tingkat II. Hal ini karena adanya kesatuan antara masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, mempunyai hak dan mempunyai kewajiban untuk mengatur serta mengurus persoalan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan Negara kesatuan republik Indonesia.



Berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 kota Palembang beberapa kali melakukan pemekaran kelurahan dan berdasarkan peraturan daerah Kota Palembang No. 20 Tahun 2007 melakukan pemekaran kecamatan, perubahan wilayah administrasi Kota Palembang dari 14 kecamatan dan 103 kelurahan menjadi 16 Kecamatan dan 107 kelurahan. Dua kecamatan pemekaran seperti Kecamatan Alang-Alang Lebar Yang Terpecah Dari Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Sematang Borang Yang Terpecah Dari Kecamatan Sako. dan terdapat 4 kelurahan baru seperti Kelurahan Talang Jambe yang awalnya terpecah dari Kelurahan Talang Betutu, Kelurahan Sukodadi terpecah dari Kelurahan Alang-Alang Lebar, Sako Baru Terpecah Dari Kelurahan Sako dan Kelurahan Karya Mulya Terpecah Dari Kelurahan Sukamulya.

**Tabel 3.2 Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Palembang Pada Tahun 2019**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Persentase
	(1)	(2)	(3)
1	Iilir Barat II	29 Iilir	6,22
2	Gandus	Gandus	68,78
3	Seberang Ulu I	3-4 Ulu	8,28
4	Kertapati	Karyajaya	9,16
5	Jakabaring	15 Ulu	42,56
6	Seberang Ulu II	14 Ulu	10,69
7	Plaju	Plaju Iilir	15,17
8	Iilir Barat I	Bukit Lama	19,77
9	Bukit Kecil	26 Iilir	9,92
10	Iilir Timur I	23 ilir	6,50
11	Kemuning	Ario Kemuning	9,00
12	Iilir Timur II	3 Iilir	10,82
13	Kalidoni	Kalidoni	14,76
14	Iilir Timur III	8 Iilir	27,92
15	Sako	Sako Baru	18,04

16	Sematang Borang	Sri Mulya	36,98
17	Sukarami	Kebun Bunga	51,46
18	Alang-alang Lebar	Talang Kelapa	34,58
Palembang			400,61

**Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)**

#### 4. Kependudukan

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 kota Palembang mempunyai penduduk sebesar 1.662.893 jiwa yang terdiri dari 834.175 jiwa penduduk laki-laki dan 828.718 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk sebelumnya pada tahun 2018, penduduk Kota Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,18 persen. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin pada tahun 2019 antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebesar 100,66 persen yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 3.3 Kependudukan Menurut Kecamatan Kota Palembang Pada Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk km <sup>2</sup>
1.	Ilir Barat II	4,11	10.679
2.	Gandus	4,23	993
3.	Seberang Ulu I	5,56	10.854
4.	Kertapati	5,48	2082
5.	Jakabaring	5,37	9480
6.	Seberang Ulu II	6,12	9247
7.	Plaju	5,68	6045
8.	Ilir Barat I	8,57	7005
9.	Bukit Kecil	2,38	3881
10.	Ilir Timur I	4,16	10.330
11.	Kemuning	5,02	9006
12.	Ilir Timur II	5,26	7857
13.	Kalidoni	7,29	4217
14.	Ilir Timur III	5,26	7857
15.	Sako	6,44	5765

16.	Sematang Borang	3,17	1383
17.	Sukarami	10,71	3361
18.	Alang-Alang Lebar	6,16	2879
	Palembang		
	Hasil Registrasi	100,24	4043
	Hasil Proyeksi	100,00	4153

**Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)**

Pada tahun 2019 Kepadatan penduduk di Kota Palembang mencapai 4.153 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk kota Palembang di 18 kecamatan beraneka ragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Palembang berada di Kecamatan Seberang Ulu I dengan kepadatan sebesar 10.854 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 993 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**Tabel 3.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Palembang Pada Tahun 2019**

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1.	0-4	73.172	69.208	142.380
2.	5-9	74.571	70.417	144.988
3.	10-14	71.158	66.202	137.360
4.	15-19	75.057	76.137	151.194
5.	20-24	76.020	74.241	150.261
6.	25-29	70.887	68.009	138.986
7.	30-34	67.900	65.374	133.274
8.	35-39	64.027	65.769	129.796
9.	40-44	60.877	61.681	122.558
10.	45-49	53.212	54.455	107.667
11.	50-54	46.882	48.507	95.389
12.	55-59	39.828	40.374	80.202
13.	60-64	26.670	26.739	53.409
14.	65-69	17.166	17.691	34.857
15.	70-75	9.245	11.504	20.749
16.	75+	7.503	12.320	19.823
	Jumlah	834.175	828.718	1.662.893

**Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)**

Jumlah Penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin yang ada di wilayah Kota Palembang pada tahun 2019 laki-laki sekitar 52,13%, sedangkan jumlah perempuan mencapai 51,79 %.

**Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Palembang Pada Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan
1.	Iilir Barat Dua	66.421	1,28
2.	Gandus	68.315	3,35
3.	Seberang Ulu Satu	89.871	1,54
4.	Jakabaring	86.837	2,12
5.	Kertapati	88.618	1,51
6.	Alang-Alang Lebar	99.556	1,94
7.	Seberang Ulu Dua	98.846	1,09
8.	Sukarami	172.965	3,16
9.	Sematang Borang	51.155	9,20
10.	Sako	104.004	2,22
11.	Iilir Timur Tiga	73.292	0,30
12.	Kalidoni	117.744	2,69
13.	Iilir Timur Dua	85.015	0,42
14.	Iilir Timur Satu	67.144	-0,82
15.	Bukit Kecil	38.502	-0,75
16.	Iilir Barat Satu	138.488	1,48
17.	Plaju	91.700	0,30
18.	Kemuning	81.050	-0,25
	Hasil Proyeksi	1.662.893	1,18

*Sumber* : Badan Pusat Statistik (BPS)

Jumlah pertumbuhan penduduk di kota Palembang menurut Kecamatan Pada tahun 2019. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Sematang Borang sebesar 9,20 % dan terendah berada di Kecamatan Kemuning sebesar 0,25%.

## **B. Biodata Fitrianti Agustinda**

Nama : Fitrianti Agustinda SH  
Lahir : Palembang, 05 Agustus 1976  
Umur : 45 Tahun  
Kebangsaan : Indonesia  
Partai Politik : PDI Perjuangan  
Pasangan : Dedi Sipriyanto  
Hubungan : Romi Herton (Kakak)  
Anak : 2  
Profesi : Politikus  
Alamat : Jln. Seruni Nomor 39 Rt.001, Rw 001, Kelurahan Bukit lama,  
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera  
Selatan.



### **Pendidikan :**

1. Tahun 1981-1988 SD Negeri 100 Palembang
2. Tahun 1988-1991 SMP Negeri 13 Palembang
3. Tahun 1991-1994 SMA Negeri 02 Palembang
4. Tahun 1994-1999 S-1 Universitas Muhammadiyah Palembang

### **Organisasi :**

1. Ketua PMI Kota Palembang Tahun 2014-2019, 2019-sekarang
2. Ketua Kwarcab Pramuka Kota Palembang
3. Ketua Harian Pengajian Raudhatunnisa Kota Palembang

4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Palembang
5. Ketua Yayasan Jantung Sehat Kota Palembang
6. Ketua Pengurus Daerah Kempo Sumatra Selatan
7. Ketua Umum PDBI Kota Palembang

Karier :

1. Tahun 2001-2004 Karyawan PT Telkomsel
2. Tahun 2004-2014 Manager SPBU 24.301.108
3. Tahun 2014-2016 Anggota DPRD Kota Palembang
4. Tahun 2016-2018, 2018-sekarang Wakil Wali Kota Palembang

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender pada Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti peneliti menggunakan teori nurture :

Teori Nurture menganggap bahwa perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan berdasarkan faktor biologis melainkan atas konstruksi masyarakat. Teori nurture mengeluarkan anggapan mengenai peran sosial yang dianggap baku dan dipahami sebagai doktrin keagamaan itu bukanlah kehendak atau kodrat dari Tuhan, tetapi sebagai produk determinasi melainkan produk konstruksi sosial. Teori nurture melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu hasil rekayasa konstruksi sosial budaya dan bukan kodrat sehingga menghasilkan peran, fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Secara sosiologis memunculkan gerakan feminisme yaitu gerakan kaum perempuan yang mempunyai fokus utama terhadap aktivitas pemberdayaan perempuan agar kedudukannya setara dengan kaum laki-laki di segala bidang yang sering disebut dengan emansipasi wanita.

Menurut Peneliti Wawancara Penelitian dengan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Ibu Dr. Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi pada Kamis, 18 Februari 2021 pukul 13.48 WIB Mengenai konsep gender, Beliau menyampaikan bahwa :

*“Gender merupakan suatu konsep kultural yang digunakan dalam membedakan peran, perilaku, kedudukan serta mentalitas antara laki-laki dan perempuan di lingkungan masyarakat. Selain itu Gender juga dianggap sebagai usaha untuk mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari segi sosial budaya, psikologis, bahkan moral dan etika. Intinya gender merupakan persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Keadilan gender sebenarnya sudah ada namun hakikat keadilan gender yang memperkuat kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaannya masih mengalami diskriminasi.”*

Sedangkan Menurut penelitian dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Srijaya Ibu Supriyati yang dilakukan pada Selasa, 23 Februari 2021 Pukul 11.02 WIB Beliau Menyampaikan Bahwa:

*“Gender dianggap sebagai perbedaan peran, tingkah laku serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak tidak bersifat kodrat atau ciptaan tuhan melainkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun masyarakat didasari budaya patriarki yang menganggap kaum laki-laki lebih pantas menjadi seorang pemimpin dibandingkan perempuan karena laki-laki dianggap lebih berwibawa dan tegas. Sedangkan, perempuan mempunyai sifat emosional, lemah lembut dan tidak tegas membuat perempuan tidak dapat menjadi pemimpin dan lebih baik berada di dalam rumah saja.”*

Hal ini terjadi melalui proses yang sangat panjang baik melalui sosialisasi, konstruksi sosial, kultural, keagamaan bahkan melalui kekuasaan negara. Lama kelamaan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai ketentuan dari tuhan atau kodrat yang tidak dapat diubah lagi. Namun pada kenyataanya gender itu bukan bersifat biologis dan bukan kodrat dari tuhan.



Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka gender dianggap sebagai sebuah perbedaan kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan di lingkungan masyarakat. Perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya. Persamaan serta keadilan gender yang dikemukakan dan dipelopori kaum feminis sudah ada sejak lama namun pelaksanaannya mengalami sebuah kendala di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu teori Nurture pada penelitian merupakan sebuah pembentukan perilaku manusia yang berasal dari pengalaman yang dipengaruhi oleh faktor budaya.

Keterwakilan perempuan sebagai pemimpin didukung oleh banyak cara serta berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satunya ialah pemimpin perempuan mendapatkan pendidikan politik dari partai tempatnya bergerak dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan hingga memajukan kaum perempuan menjadi figur publik yang bisa berada pada posisi yang setara terhadap laki-laki. Sehingga kaum perempuan mengetahui hakikatnya dalam berpolitik ialah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Wawancara Penelitian dengan Masyarakat Ilir Barat I Palembang Bapak Dani Ricardo dalam wawancara penelitian yang dilakukan pada Rabu, 09 Juni 2021 pukul 19.48 WIB. Mengenai Pemimpin Politik Perempuan Ditengah Masyarakat Kota Palembang.

*“Menurut saya saat ini kesetaraan gender sudah mulai diterapkan di negara Indonesia bahkan sudah banyak perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin mulai dari legislatif maupun eksekutif. khususnya di kota Palembang terdapat satu pemimpin perempuan yang menjadi wakil walikota hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat kota Palembang mulai menerima kehadiran pemimpin perempuan dengan harapan pemimpin tersebut bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik sama seperti kaum laki-laki dan juga pemimpin perempuan tersebut kedepannya dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi.”*

Sedangkan, Menurut Wawancara Penelitian dengan Masyarakat Kalidoni Saudara Rendy Wahyudi dalam wawancara penelitian yang dilakukan pada Rabu, 09 Juni 2021 pukul 19.48 WIB. Mengenai Pemimpin Politik Perempuan Ditengah Masyarakat Kota Palembang.

*“Masyarakat kota Palembang saat ini memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menduduki posisi khususnya sebagai pemimpin karena dari awal pemerintahan Palembang itu dipimpin laki-laki semua, jadi tidak ada masalah dan kendala untuk perempuan menjadi pemimpin asalkan dia mempunyai kriteria dan ciri khas dari seorang pemimpin itu sendiri dan pemimpin politik perempuan juga dapat membuktikan bahwa mereka dapat membawa perubahan bagi kota Palembang”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka pemimpin politik perempuan ditengah masyarakat kota Palembang diberikan kesempatan untuk memimpin sama seperti kaum laki-laki karena perempuan dan laki-laki itu semuanya mempunyai kedudukan yang sama baik dan segi sosial, politik mauppun kedudukannya. Maka dari itu hadirnya pemimpin perempuan dapat memberikan perubahan bagi masyarakat kota Palembang kearah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu teori nurture pada penelitian ini merupakan sebuah gerakan kaum perempuan yang mempunyai tujuan utama pad aktivitas

pemberdayaan kaum perempuan sehingga kedudukannya dapat setara dengan kaum laki-laki di berbagai bidang yang dikenal sebagai emansipasi wanita.

Laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan dan posisi yang tidak berbeda satu sama lain. Di sini terjadi pergeseran pandangan, bahwa sebelumnya kaum laki-laki merupakan musuh dan penindas kaum perempuan sehingga kaum perempuan menjadi korban patriarki, namun laki-laki sekarang berubah menjadi sahabat yang harmonis dalam menjalankan berbagai aktivitasnya dengan menerapkan prinsip tanpa diskriminasi, praktik emansipasi tidak sulit lagi diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Hubungan antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial berdampak pada dominasi laki-laki atas perempuan yang melawan mereka. Interaksi alamiah ini berkembang sehingga menjadi sistem sosial tertentu dan berwujud sistem monopolitik melintasi ruang dan waktu yang berbeda. Pada saat yang sama sistem sosial patriarki dibentuk. Perubahan dalam relasi atau hubungan gender belum terjadi secara kuantitatif meski sudah ada pemimpin dunia dari kalangan perempuan. Politik gender terus mengalami kendala ketika patriarki belum dimodifikasi selain itu belum ada kesadaran antara kedua jenis kelamin, kondisi yang harmonis sulit untuk diwujudkan. (Rasyidin, 2016)

Menurut Penelitian yang disampaikan dalam Wawancara Penelitian dengan Budayawan Palembang Bapak Kemas A.R Panji, S.Pd M.Si dalam penelitian yang dilakukan pada Kamis, 18 Februari 2021 pukul 13.48 WIB

Mengenai Kedudukan Wakil Walikota Perempuan Di Tengah Masyarakat Kota Palembang.

*“Kedudukan Fitrianti Agustinda sebagai wakil walikota di tengah masyarakat kota Palembang secara politis maupun nasional dianggap sah-sah saja namun dalam sudut pandang agama kepemimpinan atau kedudukan perempuan masih bertentangan dan tetap ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tidak dapat dilanggarakan tetapi dalam hukum dunia, politik dan hak asasi manusia perempuan boleh memimpin dan tidak terjadi masalah dan hal ini membuka peluang kesetaraan gender.”*

Sedangkan, menurut penelitian yang disampaikan masyarakat kecamatan bukit kecil Bapak Beng Sujana dalam wawancara penelitian yang dilakukan pada Kamis, 09 Juni 2021 Pukul 17.00 WIB Mengenai Kedudukan Wakil Walikota Perempuan Di Tengah Masyarakat Kota Palembang.

*“Kedudukan Fitrianti Agustinda sebagai wakil walikota Palembang itu dianggap biasa saja karena setelah adanya isu mengenai kesetaraan gender kaum perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin dan tidak ada apalagi dalam islam Allah tidak pernah membedakan status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan namun manusia sendiri lah yang sering membeda-membedakan dan beranggapan bahwa laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan baik dalam kerumah tanggaan maupun dalam sosial, politik lainnya.”*

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Kelurahan Srijaya Ibu Supriyati dalam wawancara penelitian yang dilakukan pada Selasa, 23 Februari 2021 pukul 14.05 WIB Mengenai Kedudukan Wakil Walikota Perempuan Di Tengah Masyarakat Kota Palembang.

*“Masyarakat Palembang itu bermayoritaskan agama Islam, dalam Islam kedudukan perempuan menjadi seorang pemimpin sebenarnya tidak masalah namun menurut pandangan ulama perempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin ketika masih ada laki-laki yang dapat menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi secara umum sudah banyak perempuan menjadi seorang pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif seperti halnya wakil walikota Palembang. Awalnya kehadiran wakil walikota perempuan masih dianggap langka oleh masyarakat karena pemimpin itu biasanya laki-laki namun seiring berjalan waktu pemikiran masyarakat mulai terbuka dan mulai menerima kedudukan perempuan menjadi seorang pemimpin serta memberikan kesempatan agar perempuan dapat bekiprah di dunia politik sama dengan kaum laki-laki.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka kedudukan wakil walikota perempuan ditengah masyarakat Palembang dianggap sebagai suatu hal yang langka terjadi karena dalam masyarakat Palembang yang berlandaskan dengan syariat Islam pemimpin itu lebih domain kepada kaum laki-laki. Namun dalam sudut pandang ulama atau sebagian masyarakat terdapat pertentangan serta penolakan mengenai pemimpin perempuan.

Oleh karena itu teori nurture pada penelitian ini merupakan sebuah pemahaman mengenai peran serta kedudukan sosial yang dianggap sudah baku dan dianggap sebagai sebuah doktrin keagamaan. Hal ini sesungguhnya terjadi bukan atas kehendak kodrat Tuhan dan juga terjadi bukan produk determinasi biologis melainkan sebagai produk konstruksi sosial yang diciptakan masyarakat.

Adanya kedudukan pemimpin perempuan di tengah masyarakat merupakan suatu hal yang baru khususnya di tengah masyarakat kota Palembang maka masyarakat harus memberikan kesempatan agar pemimpin perempuan juga mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki selain itu pemimpin perempuan dapat menjadi seorang pemimpin dan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menciptakan sebuah hal dan perubahan yang baru di tengah masyarakat kota Palembang.

Menurut Penelitian yang disampaikan oleh Tokoh Agama Kota Palembang Ustad Nabi Idris dalam wawancara penelitian yang dilakukan pada Selasa, 23 Februari 2021 pukul 15.00 WIB Mengenai Perubahan Setelah Fitrianti Agustinda Menjabat Sebagai Wakil Walikota Palembang.

*“Terdapat perubahan setelah Fitrianti Agustinda menjabat sebagai wakil walikota Palembang. Perubahan ini terjadi pada kaum perempuan khususnya pada ibu-ibu rumah tangga karena kehadiran Fitrianti yang dekat dengan mereka dan Fitrianti juga memberikan dorongan agar perempuan dapat mengembangkan kreativitas mereka melalui Umkm yang sudah ada di kota Palembang bahkan membuat inovasi baru dari umkm yang belum ada di kota Palembang. Selain itu terjadi beberapa perubahan baik di bidang ekonomi, bidang pembangunan, pertahanan dan berbagai perubahan lainnya sehingga membawa kota Palembang lebih baik dan maju lagi kedepannya.”*

**Gambar 4.1 Saat Fitrianti Berkunjung ke Umkm Pembuatan masker di kecamatan Sukarame.**



**Gambar 4.2 Saat Fitrianti Berkunjung kerumah Warga yang terkena musibah.**



Sedangkan, menurut penelitian yang disampaikan oleh Masyarakat Kecamatan Kalidoni Bapak Yohannes Asmawi dalam wawancara pada Rabu, 09 Juni 2021 Pukul 15.30 WIB.

*“Terdapat perubahan setelah adanya pemimpin perempuan bisa dilihat pertama, dia sangat dekat dengan masyarakat ketika masyarakat butuh pertolongan Fitrianti langsung hadir ke lokasi masyarakat tersebut, kedua dia tidak segan menindak lanjuti laporan-laporan warga mengenai masalah yang ada di lingkungan sekitar kota Palembang misalnya dia turun kejalan untuk melihat banjir, pohon tumbang bendungan, dsb.”*

Menurut peneliti yang disampaikan oleh Masyarakat Ilir Barat I Ibu Wenda Yunita dalam wawancara pada Rabu, 09 Juni 2021 pukul 20.15 WIB Mengenai Perubahan Setelah Fitrianti Agustinda Menjabat Sebagai Wakil Walikota Palembang.

*“Setelah terpilihnya Fitrianti Agustinda sebagai wakil walikota Palembang. Kota Palembang mulai mengalami perubahan seperti peningkatan ekonomi kesejahteraan rakyat khususnya pada Umkm yang dituntut kreatif serta inovatif, terjadi perubahan dalam pembangunan infrastruktur Kota Palembang seperti perbaikan jalan-jalan yang rusak, jembatan ambruk, bendungan yang bocor, lingkungan rawan banjir, pembangunan taman dan tempat wisata lainnya agar Kota Palembang dapat menjadi lokasi pariwisata yang disukai oleh masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Selain itu juga Fitrianti Agustinda tidak segan untuk melihat langsung masyarakat yang butuh pertolongan dari dirinya. Menurut saya perubahan Fitrianti ini sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi mereka ketika mencalonkan diri menjadi walikota beserta wakil walikota Palembang”*



**Gambar 4.3 Saat Fitrianti menindak lanjuti Laporan Masyarakat.**



**VISI** : Tercapainya Palembang Emas Darussalam 2023

- MISI** :
1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi.
  2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa dan professional.
  3. Mewujudkan Kota Palembang yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan intrnasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa

aman untuk berinvestasi.

4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta mempunyai daya saing yang tinggi.
5. Menjadikan Kota Palembang sebagai kota pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

(Palembang P. R., 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai perubahan setelah Fitrianti Agustinda menjabat sebagai wakil walikota Palembang ialah dilihat dari segi ekonomi masyarakat bahkan segi pembangunan infrastruktur Kota Palembang dan terjadinya perubahan ini dianggap sesuai dengan visi-misi mereka. Hal ini membuktikan bahwa bukan laki-laki saja yang dapat memimpin dan menciptakan perubahan melainkan perempuan juga dapat memimpin serta menciptakan perubahan. Oleh karena itu teori nurture pada penelitian ini menganggap bahwa perbedaan peran, kedudukan serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil rekayasa konstruksi sosial budaya dan bukan bersifat biologis atau kodrat tuhan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Politik Gender (Studi atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda). Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa menurut teori nurture perbedaan hubungan antara perempuan dan laki-laki tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan dibentuk oleh konstruksi masyarakat hal ini karena masyarakat menganggap laki-laki berbeda dengan perempuan, laki-laki tepat menjadi pemimpin sedangkan perempuan lebih tepat berada di dalam rumah. Perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai hasil konstruksi sosia budaya bukan kodrati secara tidak langsung menghasilkan perbedaan peran, kedudukan, fungsi serta tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan di atas, maka sebagai penutup penelitian skripsi ini, peneliti memberikan saran ialah : Untuk akademis peneliti sangat berharap penelitian ini berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik pembahasan yang sama. Serta bisa menjadi bahan pembelajaran untuk mahasiswa lainnya dalam mengetahui tentang kedudukan dan kepemimpinan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CvJejak.
- Fakih, M. (2012). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendri Hermawan Adinugraha, A. S. (2018). Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender. *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 17, No.1.*, 42-43.
- Heywood, A. (2016). *Ideologi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Intan, S. (2014). Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender. *Jurnal : Politik Profetik, Vol.3, No.1* , 13-14.
- Jaya, A. C. (2018). *Kedudukan Wanita Dalam Ranah Politik di Indonesia Menurut Pandangan Islam*. Palembang : Raffah Press.
- Khuza'i, M. (2013). Problem Definisi Gender : Kajian atas Konsep Nature dan Nurture. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 11, No.1.*, 106-110.
- Lembaga Adat Melayu Riau. (2018). *Pendidikan Budaya Melayu Riau*. Riau: Lembaga Adat Melayu Riau.
- Maimunah. (2017). Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya. *Jurnal Al-Afkar, Vol. V No.1.*, 61-62.
- Mamik. (2015). *Metodelogi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama.
- Ni Nyoman Sukerti, I. G. (2016). *Gender Dalam Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi.
- Palembang, B. P. (2020). *Kota Palembang Dalam Angka 2020*. Palembang: BPS Kota Palembang.
- Palembang, P. R. (2019). *Sejarah Kota Palembang*. Retrieved Desember 14, 2020, from Palembang.go.id: <https://palembang.go.id/new/beranda/sejarah>.
- Rahim, A. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 9 No.2*, 268.
- Rasyidin, F. A. (2016). *Gender dan Politik Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Sulawesi: Unimal Press.

- Reny Yulianti, D. D. (2018). Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 10 No. 2, 18.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender & Feminisme*. Yogyakarta: Gadrudhawaca.
- Sumeks.Co. (2019, Agustus 15). *Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) beri penghargaan kepada Fitrianti Agustinda*. Retrieved Juni 31, 2020, from Sumeks.co: <http://sumeks.co/ikatan-pelajar-muhammadiyah-ipm-beri-penghargaan-kepada-Fitrianti-Agustinda>
- Ulfatun Hasanah, N. M. (2017, Oktober 03). Gender dan Politik, Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *SAWWA* -, 12.
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, Vol.1 No.1, 64-66.
- Yudiatmaja, F. (2013, Agustus 02). Kepemimpinan : Konsep, Teori dan Karakternya. *Media Komunikasi FIS*, Vol 12, 31-32.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

# LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dita Pratiwi Harianti  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 05 Maret 1999  
Agama : Islam  
Anak : Ke 2 dari 2 Bersaudara  
Alamat : Jalan Kolonel Haji Burlian



Lorong Peristiwa No. 330 Rt. 06 Rw. 02 Km5 Kota  
Palembang Sumatera Selatan.

Ayah dan Ibu : Dadang Harianto dan Annisa As  
Email : htiwik@gmail.com  
No Telepon : 089677207389

### **Riwayat Pendidikan:**

1. 2004-2010 Sekolah Dasar (SD) Negeri 42 Palembang.
2. 2010-2013 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Iman Palembang.
3. 2013-2016 Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Tata Busana (SMK) 06 Palembang.
4. 2017-2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

### **Pengalaman Organisasi:**

1. 2017-2019 Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
2. 2018-2019 Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Wawancara Penelitian dengan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Fatah Palembang Ibu Dr.Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi



Foto Bersama Ibu Dr.Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi





Wawancara Penelitian dengan Tokoh Agama Kota Palembang Ustad Nabel Idris



Foto Bersama dengan Ustad Nabel Idris



Wawancara Penelitian dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Srijaya Ibu Supriyati



Foto Bersama dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Srijaya Ibu Supriyati





Wawancara Penelitian dengan Budayawan Palembang Bapak Kemas A.R Panji,

S.Pd M.Si



Wawancara Penelitian dengan Masyarakat Ilir Barat I Ibu Wenda Yunita S.Pd



Foto bersama dengan Masyarakat Ilir Barat I Ibu Wenda Yunita S.Pd





Wawancara Penelitian dengan Masyarakat Ilir Barat I Bapak Dani Ricardo



Foto bersama Masyarakat Ilir Barat I Bapak Dani Ricardo



Wawancara Penelitian dengan Masyarakat Kalidoni Saudara Rendy Wahyudi



Foto bersama Masyarakat Kalidoni Saudara Rendy Wahyudi





Wawancara Penelitian dengan Masyarakat Kalidoni Saudara Rendy Wahyudi



Foto bersama Masyarakat Kalidoni Bapak Yohannes Asmawi



Wawancara Penelitian dengan Masyarakat Kecamatan Bukit Kecil Bapak Beng

Sujana





## **Pedoman Wawancara**

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Mengenai Persoalan Gender ?
2. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Terhadap Sikap Masyarakat Kota Palembang Mengenai Persoalan Gender Saat Ini ?
3. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Mengenai Pemimpin Politik Perempuan Ditengah Masyarakat Kota Palembang ?
4. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Mengenai Kedudukan Wakil Walikota Perempuan Ditengah Masyarakat Kota Palembang ?
5. Apakah Tanggapan Bapak/Ibu Terhadap Kedudukan Kepemimpinan Perempuan Saat Ini. Apakah Harus Lebih Banyak Pemimpin Perempuan Saat Ini Dibandingkan Laki-Laki ?
6. Apakah Bapak/Ibu Merasakan Perubahan Setelah Fitrianti Agustinda Menjabat Sebagai Wakil Walikota Palembang?



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km 3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa : Dita Pratiwi Harianti  
 NIM : 1730702059  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Judul Skripsi : Wakil Walikota Perempuan Di Tengah Masyarakat Melayu Dalam Perspektif Gender (Studi Atas Kedudukan Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda)  
 Pembimbing I : Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum

No	Hari/ Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	Senin 10-September-2021	Perbaikan bab I	/
2.	Jumat 13-September-2021	Acc bab I. Lanjut bab II & III	/
3.	Kamis 14-September-2021	Konsultasi bab II dan bab III	/
4.	Kamis 18-Februari-2022	Perbaikan bab II dan perantara	/
5.	Senin 23-Februari-2022	Materi bab III tentang Melayu Palembang	/
6.	Selasa 09-Maret-2022	Acc bab II dan III. Lanjut bab IV	/
7.	Rabu 21-April-2022	Konsultasi Bab IV	/
8.	Selasa 11-Mei-2022	Perbaikan Serta Penambahan materi kedudukan perempuan dalam ranah politik	/
9.	Senin 24-Mei-2022	Acc bab IV dan bab V	/



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : Dita Pratiwi Harianti  
 NIM : 1730702059  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Judul Skripsi : Wakil Walikota Perempuan Di Tengah Masyarakat Melayu Dalam Perspektif Gender (Studi Atas Kedudukan Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda)  
 Pembimbing II : Siti Anisyah, M.Si

No	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	Rabu 04-September-2020	Perbaiki Latar belakang Bab I	
2.	Rabu 11-September-2020	Acc bab I	
3.	Selasa 08-Desember-2020	Konsultasi Untuk bab II dan III	
4.	Kamis 04-Februari-2021	Perbaikan Materi Kajian Kepustakaan mengenai gender dan kepemimpinan perempuan	
5.	Senin 15-Februari-2021	Konsultasi mengenai pertanyaan penelitian.	
6.	Rabu 17-Februari-2021	Acc Bab II dan III. Lanjut bab IV	
7.			



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : Dita Pratiwi Harianti  
 NIM : 1730702059  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Judul Skripsi : Wakil Walikota Perempuan Di Tengah Masyarakat Melayu Dalam Perspektif Gender (Studi Atas Kedudukan Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda)  
 Pembimbing II : Siti Anisyah, M.Si

No	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
7	Senin 01 maret 2021	Konsultasi mengenai materi dan penulisan bab IX	
8	Selasa 23 maret 2021	Penam bahan materi bab IX	
9	Kamis 15 april 2021	Pertalkan hasil analisis wawancara	
10	Jumat 30 april 2021	Penambahan materi mengenai kepemimpinan perempuan serta kedudukannya secara umum dan melayu.	
11	Rabu 05 mei 2021	Konsultasi bab IX dan V	
12	Senin 24 mei 2021	Acc bab I, X dan V dilanjutkan Membuat - abstrak, Daftar isi dan daftar riwayat - kata pengantar, B. moto dan persentian	







KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : B.14/14 /Un.09/VIII/PP.01/11/2020  
Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
  2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
  3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Dita Pratiwi Harianti*, tanggal 23 September 2020

- MENINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
  2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
  3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
  4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
  5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
  6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

Pertama : Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum.	197201192007011011	Pembimbing I
Siti Anisyah, M.Si.	2012129301	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Dita Pratiwi Harianti  
N I M : 1730702059  
Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :

**"Wakil Walikota Perempuan di Tengah Masyarakat Melayu dalam Perspektif Gender (Studi Atas Kedudukan Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda)."**

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 30 November 2020 s/d 30 November 2021

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

- Tembusan:
1. Rektor;
  2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
  3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
  4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
  5. Arsip;





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.1506 /Un.09/VIII/PP.01/12/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth  
**Tokoh Masyarakat Palembang**  
Di  
**Palembang**

*Assalammu'alaikum, Wr. Wb*

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Dita Pratiwi Harianti  
NIM : 1730702059  
Semester : VII (Tujuh)  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang  
Judul Skripsi : *Wakil Walikota Perempuan di Tengah Masyarakat Melayu dalam Perspektif Gender (Studi Atas Kedudukan Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda)*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Knowledge, Quality & Integrity

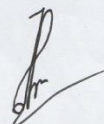

Tembusan  
1. Ka.Prodi Ilmu Politik  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip

Palembang, 18 Desember 2020  
  
Dekan,  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN  
RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Prof. Dr. Izomiddin, MA  
NIP. 196206201988031001

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN  
SKRIPSI**

Nama : Dita Pratiwi Harianti  
Nim : 1730702059  
Program Studi : Ilmu Politik  
Tanggal Ujian Munaqosah : 08 Juni 2021  
Judul Skripsi : Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Politik Gender.  
(Studi Atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda)

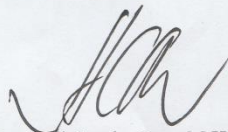
TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN SAAT UJIAN MUNAQOSAH dan  
TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI 1 dan PENGUJI 2.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.Kun Budianto S, Ag, S, H.,M. Si	Penguji 1	
2.	Reni Apriani, M.Si	Penguji 2	

Palembang, 10 Juni 2021

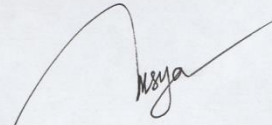
**MENYETUJUI**

Pembimbing 1



Dr, Andi Candra Jaya, M.Hum  
NIP. 197201192007011011

Pembimbing 2



Siti Anisyah, M. Si  
NIDN.2012129301





KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan Juni tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **Dita Pratiwi Harianti**  
Nomor Induk Mahasiswa : **17300702059**  
Jurusan/Program Studi : **Ilmu Politik**  
Judul Skripsi : **Wakil Walikota Perempuan di Tengah Masyarakat Melayu Dalam Perspektif Gender**

**MEMUTUSKAN**

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan **LULUS / TIDAK-LULUS**, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaikan dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum	Pembimbing I	
2	Siti Anisyah, M.Si.	Pembimbing II	
3	Dr. Kun Budianto, M.Si.	Penguji I	
4	Reni Apriani, M.Si.	Penguji II	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 8 Juni 2021

Ketua

**Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hl.**  
NIP. 197409242007012016

Sekretaris

**Ryllian Chandra Eka Viana, MA.**  
NIP. 198604052019031011



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN  
Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Dita Pratiwi Harianti  
Nomor Induk Mahasiswa : 17300702059  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : *Wakil Walikota Perempuan di Tengah  
Masyarakat Melayu Dalam Perspektif Gender*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Palembang, 8 Juni 2021  
Ketua Sidang

Dr. Eti Yusnita S.Ag., M.H.I  
NIP.197409242007012016